

PENGADILAN AGAMA METRO

LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun
2021**

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068

E-mail : pametro_lampung@yahoo.com



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA METRO**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068

e-mail : pametro_lampung@yahoo.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

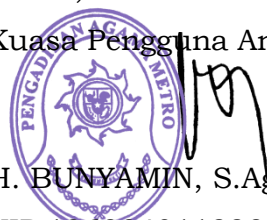
Pengadilan Agama Metro adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Metro, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Metro. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA METRO' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H. BUNYAMIN, S.Ag

NIP.196804011992031004

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Metro, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,



H. BUNYAMIN, S.Ag

NIP.196804011992031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	51

Lampiran dan Daftar

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro Semester II Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 4.510.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.426.922.931 atau mencapai 95.84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.662.772.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 15.629.893.328 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 46.245.545; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 15.583.647.783; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 44.202.667; dan Rp. 15.585.690.661.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 3.015.251.334; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 3.015.251.334; Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 3.015.251.334

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 031 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 15.648.789.046 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 3.015.251.334 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.952.152.949, sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 15.585.690.661.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN DESEMBER 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021		%	30 JUNI 2020
		ESTIMASI / ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.510.000	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		4.510.000	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.020.893.000	2.318.742.281	46,18	1.961.365.337
Belanja Barang	B.4	1.028.465.000	433.910.668	42,19	462.919.418
Belanja Modal	B.5	265.000.000	199.500.000	75,28	386.415.000
JUMLAH BELANJA		6.314.358.000	2.952.152.949	46,75	2.810.699.755

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA METRO
NERACA
PER 30 JUNI 2021 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	43.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	3.245.545	1.204.425
Persediaan Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		46.245.545	1.204.425
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5.829.194.000	5.829.194.000
Peralatan dan Mesin	C.15	2.389.548.905	2.190.048.905
Gedung dan Bangunan	C.16	9.654.215.789	9.654.215.789
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	597.369.000	597.369.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.633.478	3.633.478
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2.890.313.389)	(2.616.632.343)
Jumlah Aset Tetap		15.583.647.783	15.657.828.829
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	20.750.000	20.750.000
Aset Lain-Lain	C.22	141.212.650	141.212.650
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(161.962.650)	(161.962.650)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		15.629.893.328	15.659.033.254
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	43.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	9.041.541
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	1.202.667	1.202.667
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		44.202.667	10.244.208
JUMLAH KEWAJIBAN		44.202.667	10.244.208
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	15.585.690.661	15.648.789.046
JUMLAH EKUITAS		15.585.690.661	15.648.789.046
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.629.893.328	15.659.033.254

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.318.742.281	1.961.365.337
Beban Persediaan	D.3	6.284.238	10.597.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	343.068.868	305.781.040
Beban Pemeliharaan	D.5	58.924.901	118.975.615
Beban Perjalanan Dinas	D.6	14.550.000	19.106.900
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	273.681.046	275.690.485
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		3.015.251.334	2.691.516.877
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.015.251.334)	(2.691.516.877)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
		D.11	
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1.069.550
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	924.093
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	145.457
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.015.251.334)	(2.691.371.420)
POS LUAR BIASA			
		D.12	
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.015.251.334)	(2.691.371.420)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020
EKUITAS AWAL	E.1	15.648.789.046	15.813.189.752
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.015.251.334)	(2.691.371.420)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.952.152.949	2.810.699.755
EKUITAS AKHIR	E.5	15.585.690.661	15.932.518.087

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Visi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Agama Metro sebagai berikut:

Misi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Metro menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Lalu dari tujuan strategis di atas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Metro. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulaidari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Metro menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis

kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Metro dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan

sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan

mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp. 0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.4.510.000. Pendapatan Pengadilan Agama Metro terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2021		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan bangunan	4.510.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang lalu	-	-	-
Jumlah	4.510.000	-	-

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, dibandingkan per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan serta tidak ada Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Realisasi
Belanja
Negara Rp.
2.952.152.949

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.952.152.949 atau 46,75 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.314.358.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.020.893.000	2.318.742.281	46,18
Belanja Barang	1.028.465.000	433.910.668	42,19
Belanja Modal	265.000.000	199.500.000	75,28
Total Belanja Kotor	6.314.358.000	2.952.152.949	46,75
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	6.314.358.000	2.952.152.949	46,75

Dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2020, Realisasi Belanja 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,03% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya jumlah pegawai Pengadilan Agama Metro,

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.318.742.281	1.961.365.337	18,22
Belanja Barang	433.910.668	462.919.418	(6,27)
Belanja Modal	199.500.000	386.415.000	(48,37)
Jumlah	2.952.152.949	2.810.699.755	5,03

Belanja
Pegawai Rp.
2.318.742.281

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.2.318.742.281 dan Rp.1.961.365.337 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 18,22 % dari 31 Desember 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	932.593.000	823.670.280	13,22
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.861	10.344	24,33
Belanja Tunj. Suami Istri PNS	58.409.388	52.902.910	10,41
Belanja Tunj. Anak PNS	20.945.216	18.890.338	10,88
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.040.000	20.160.000	14,29
Belanja Tunj. Fungsional PNS	988.220.000	793.370.000	24,56
Belanja Tunj. PPh PNS	143.247.591	98.705.138	45,13
Belanja Tunj. Beras PNS	48.014.460	37.875.660	26,77
Belanja Uang Makan PNS	98.780.000	110.971.000	(10,99)
Belanja Tunj Umum PNS	5.665.000	5.365.000	5,59
Belanja Uang Lembur PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.318.927.516	1.961.920.670	18,20
Pengembalian Belanja Pegawai	(185.235)	(555.333)	(66,64)
Jumlah Belanja	2.318.742.281	1.961.365.337	18,22

Belanja
Barang Rp.
433.910.668

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 433.910.668 dan Rp. 462.919.418 Realisasi belanja barang 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 6,27% dari realisasi belanja barang 31 Desember 2020.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	265.806.350	244.232.525	8,83
Belanja Barang Non Operasional	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan	10.913.950	13.431.516	(18,74)
Belanja Jasa	86.304.059	72.241.776	19,47
Belanja Pemeliharaan	56.336.309	113.906.701	(50,54)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.550.000	19.106.900	(23,85)
Jumlah Belanja Kotor	433.910.668	462.919.418	(6,27)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	433.910.668	462.919.418	(6,27)

Belanja Modal

Rp.

199.500.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 199.500.000 dan Rp. 386.415.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 48,37% dibandingkan 31 Desember 2020 disebabkan karena meningkatnya pagu belanja modal pada tahun ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi 30 Juni 2020	Realisasi 30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.500.000	386.415.000	(48,37)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya (anti Virus)	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	199.500.000	386.415.000	-48,37
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	199.500.000	386.415.000	-48,37

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.
43.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.43.000.000 dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	43.000.000	0
BRI Cabang Metro A/C 00000130.01.000084.30.8	0	0
Jumlah	43.000.000	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai rekening Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	-	-
Uang di Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB
Rp. 0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum

diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian		31 Desember 2020
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar TPA **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Rp. 0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Rp. 0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang

lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Persekot/ Uang muka gaji	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.3.245.545*

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.3.245.545 dan Rp.1.204.425.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	3.245.545	1.204.425
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	3.245.545	1.204.425

Persediaan
Belum
Diregister Rp. 0

C.10 Persediaan Belum Diregister

Nilai Persediaan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Persediaan Belum Diregister dengan nilai minus muncul dikarenakan barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional kantor telah dibeli akan tetapi pembelian tersebut belum diajukan (GU) ke KPPN. Rincian Persediaan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Persediaan Belum Diregister	-	-
Jumlah	-	-

Tagihan
TP/TGR
Rp. 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar

hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp. 0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp.
5.829.194.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Metro per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.5.829.194.000 dan Rp. 5.829.194.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	5.829.194.000
Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2021	5.829.194.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah

sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2021

No	Luas	Peruntukan	Nilai
1	355 m2	Rumah Dinas PA Metro	494.831.000
2	5315 m2	Gedung Kantor PA Metro	5.334.363.000
Jumlah			5.829.194.000

*Peralatan dan
Mesin Rp.
2.389.548.905*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 2.389.548.905 dan Rp. 2.190.048.905. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.190.048.905
Mutasi tambah :	199.500.000
- Pembelian	199.500.000
Mutasi kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2021	2.389.548.905
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	-1.685.120.831
Nilai Buku per 30 Juni 2021	704.428.074

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
9.654.215.789*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 9.654.215.789 dan Rp. 9.654.215.789. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	9.654.215.789
Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2021	9.654.215.789
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(928.189.164)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	8.726.026.625

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
597.369.000*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 597.369.000 dan Rp. 597.369.000.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	597.369.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2021	597.369.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	(277.003.394)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	320.365.606

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp. 3.633.478*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 3.633.478 dan Rp. 3.633.478. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	3.633.478
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2021	3.633.478
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku per 30 Juni 2021	3.633.478

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp. 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.
2.890.313.389*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. 2.890.313.389 dan Rp. 2.616.632.343.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2021*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.389.548.905	1.685.120.831	704.428.074
2	Gedung dan Bangunan	9.654.215.789	928.189.164	8.726.026.625
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	597.369.000	277.003.394	320.365.606
4	Aset Tetap Lainnya	3.633.478	0	3.633.478
Jumlah		12.644.767.172	2.890.313.389	9.754.453.783

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp.
20.750.000*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 20.750.000 dan Rp. 20.750.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Metro berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 desember 2020	20.750.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2021	20.750.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2020	(20.750.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	0

Aset Lain-
Lain Rp.
141.212.650

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 141.212.650 dan Rp. 141.212.650.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	141.212.650
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2021	141.212.650
Akumulasi Penyusutan	(141.212.650)
Nilai Buku per 30 Juni 2021	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.
(161.962.650)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. (161.962.650) dan Rp. (161.962.650)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset
Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	20.750.000	20.750.000	0
Jumlah	20.750.000	20.750.000	0
Aset Lain-lain	141.212.650	141.212.650	0
Jumlah	161.962.650	161.962.650	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.43.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 43.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 0*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 9.041.541. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan

Diterima di

Muka

Rp. 1.202.667

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.202.667 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Ekuitas

Rp.

15.585.690.66

1

C.27 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.585.690.661 dan Rp. 15.648.789.046. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp. 0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	5.207.616	(100,00)
Persekot / Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	-	5.207.616	(100,00)

*Beban
Pegawai Rp.
2.318.742.281*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.318.742.281 dan Rp. 1.961.365.337

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	932.593.000	823.670.280	13,22
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.861	10.344	24,33
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(235)	(333)	(29,43)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58.409.388	52.902.910	10,41
Beban Tunj. Anak PNS	20.945.216	18.890.338	10,88
Beban Tunj. Struktural PNS	23.040.000	20.160.000	14,29
Beban Tunj. Fungsional PNS	988.220.000	793.370.000	24,56
Beban Tunj. PPh PNS	143.247.591	98.705.138	45,13
Beban Tunj. Beras PNS	48.014.460	37.875.660	26,77
Beban Uang Makan PNS	98.780.000	110.971.000	(10,99)
Beban Tunjangan Umum PNS	5.480.000	4.810.000	13,93
Beban Uang Lembur	0	0	-
Jumlah	2.318.742.281	1.961.365.337	18,22

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan Rp. 6.284.238.

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.284.238 dan Rp. 10.597.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	6.284.238	10.597.500	-40,70
Jumlah	6.284.238	10.597.500	-40,70

Beban Barang dan Jasa Rp. 343.068.868

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 343.068.868 dan Rp. 305.781.040. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya beban barang operasional lainnya sampai dengan bulan Juni 2021.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	220.959.650	208.841.238	5,80
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas	171.500	135.500	26,57
Beban honor operasional satker	14.000.000	17.250.000	(18,84)
Beban barang operasional lainnya	29.862.000	13.949.800	114,07
Beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19	-	2.205.000	(100,00)
Beban bahan	-	-	0,00
Beban barang non operasional lainnya	-	-	0,00
Beban Langganan Listrik	35.367.678	31.544.085	12,12
Beban Langganan Telepon	4.908.040	3.855.417	27,30
Beban Sewa	37.800.000	28.000.000	35,00
Jumlah	343.068.868	305.781.040	12,19

Beban Pemeliharaan Rp. 58.924.901

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.924.901 dan Rp.118.975.615. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang

sudah ada ke dalam kondisi normal. penurunan beban pemeliharaan karena berkurangnya jumlah pagu anggaran yang digunakan untuk renovasi gedung kantor dan rumah dinas. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.379.685	90.799.000	(67,64)		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	730.000	350.000	108,57		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.226.624	22.757.701	15,24		
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.588.592	5.068.914	(48,93)		
Jumlah	58.924.901	118.975.615	(50,47)		

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
14.550.000*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 20201 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.550.000 dan Rp. 19.106.900. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh turunnya jumlah Undangan dan konsultasi yang dibebankan pada DIPA kantor.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	12.150.000	18.206.900	(33,27)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	900.000	166,67
Jumlah	14.550.000	19.106.900	(23,85)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai beban untuk diserahkan pada masyarakat.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Bantuan

D.8 Beban Bantuan Sosial

Sosial Rp. 0 Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena tidak ada pagu anggaran untuk beban bantuan sosial.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 273.681.046

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 273.681.046 dan Rp. 275.690.485

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	130.322.580	132.332.019	(1,52)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	105.418.242	105.418.242	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	36.545.083	36.545.083	-
Beban Penyusutan Irigasi dan Jaringan	1.395.141	1.395.141	-
Jumlah Penyusutan	273.681.046	275.690.485	(0,73)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah	0	0	-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp. 0.*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional periode per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 145.457. Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Periode per 31
Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pelepasan Aset Non Lancar	0	0	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	1.069.550	(100,00)
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	-924.093	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	145.457	(100,00)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Pos Luar Biasa sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020*

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPN	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp.

15.648.789.04

6

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.648.789.046 dan Rp. 15.813.189.752.

Defisit LO
Rp.
(3.015.251.334)
4)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (3.015.251.334) dan Rp. (2.691.371.420). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp. 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.
0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp.0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Aset

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Revaluasi Rp. 0

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Lain Rp. 0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Jumlah	0

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.952.152.949 dan Rp. 2.810.699.755. Transaksi antar Entitas adalah

Rp.

2.952.152.949

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.952.152.949
Diterima Dari Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	2.952.152.949

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Diterima dari
Entitas lain
Rp. 0 dan
Ditagihkan ke
Entitas lain
Rp.
2.952.152.949*

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 2.952.152.949.

*Transfer masuk
Rp. 0 dan
Transfer Keluar
Rp. 0*

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	0	0
2	Persediaan	0	0
	Jumlah	0	0

*Pengesahan
Hibah Langsung
Rp. 0*

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

*Pengembalian
Pengesahan
Hibah Langsung
Rp. 0*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 0.

*Ekuitas Akhir
Rp.
15.585.690.661*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.585.690.661 dan Rp. 15.932.518.087.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian yang penting apapun setelah tanggal neraca di satuan Kerja Pengadilan Agama

Metro untuk periode per 31 Desember 2021 yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN :

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut BPK pada periode 31 Desember 2021.

F.2.2 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro adalah:

- BRI CABANG METRO A/C 653244023551000 an. BPG 126 PA Metro 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA MARI dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0.

F.2.3 Revisi DIPA

Pada Periode yang berakhir 31 Desember 2021 Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro terdapat revisi DIPA sebagai berikut : Revisi ke-1, tanggal 15 Juni 2021 terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

F. 2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat mengenai SPM, SP2D, SSBP dan SSPB Pada Periode yang berakhir 31 Desember 2021 di Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

- Tidak terdapat catatan penting pada kantor Pengadilan Agama Metro untuk periode 31 Desember 2021 yang dapat diungkapkan pada Laporan keuangan ini.

PENGADILAN AGAMA METRO
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 30 Juni 2021	Beban Peny. Per 30 Juni 2021	Akm. Peny. Per 30 Juni 2021	Nilai Buku Per 30 Juni 2021
A	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	2	17.661.100	17.661.100	-	17.661.100	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	3	502.779.117	227.966.259	22.901.071	250.867.331	251.911.786
3	Alat Kantor	24	100.624.401	92.880.401	2.981.000	95.861.401	4.763.000
4	Alat Rumah Tangga	280	813.782.415	598.938.015	47.097.100	646.035.115	167.747.300
5	Alat Studio	18	53.788.000	3.040.800	5.378.800	8.419.600	45.368.400
6	Alat Komunikasi	15	26.010.000	25.130.000	440.000	25.570.000	440.000
7	Alat Kedokteran	1	990.000	594.000	99.000	693.000	297.000
8	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2	21.340.000	5.690.672	711.334	6.402.006	14.937.994
9	Alat Khusus Kepolisian	1	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-
10	Komputer Unit	48	666.084.600	455.268.100	38.942.200	494.210.300	171.874.300
11	Peralatan Komputer	17	184.736.590	125.876.222	11.772.074	137.648.296	47.088.294
12	Peralatan Olahraga	1	32.000	32.000	-	32.000	-
	Jumlah	412	2.393.328.223	1.558.577.569	130.322.579	1.688.900.149	704.428.074
B	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	12	8.481.386.789	695.127.987	87.183.588	782.311.575	7.699.075.214
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	708.979.000	84.190.635	12.027.234	96.217.869	612.761.131
3	Tugu/Tanda Batas	3	469.411.000	43.894.319	6.270.617	50.164.936	419.246.064
	Jumlah	18	9.659.776.789	823.212.941	105.481.439	928.694.380	8.731.082.409
C	Jalan dan Jembatan						
1	Jalan	1261	518.485.000	225.836.583	36.545.083	262.381.666	256.103.334
	Jumlah	1261	518.485.000	225.836.583	36.545.083	262.381.666	256.103.334
D	Irigasi						
1	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2	44.278.000	6.737.962	962.566	7.700.528	36.577.472
	Jumlah	2	44.278.000	6.737.962	962.566	7.700.528	36.577.472
E	Jaringan						
1	Jaringan Listrik	1	34.606.000	6.488.625	432.575	6.921.200	27.684.800
	Jumlah	1	34.606.000	6.488.625	432.575	6.921.200	27.684.800
F	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Kantor	106	39.193.400	39.193.400	-	39.193.400	-
2	Alat Rumah Tangga	165	32.376.261	32.376.261	-	32.376.261	-
3	Alat Komunikasi	2	52.000	52.000	-	52.000	-
4	Komputer Unit	9	87.121.000	87.121.000	-	87.121.000	-
5	Peralatan Komputer	1	950.000	950.000	-	950.000	-
	Jumlah	283	159.692.661	159.692.661	0	159.692.661	0

* Beban Amortisasi